PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE

Anak Agung Cintya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aguncintya24@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diah_ratna@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i01.p4

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus guna mengkaji proses dan dasar hukum dalam penerapan restorative justice di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada kajian terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan guna membangun argumentasi hukum melalui pokok permasalahan, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian jurnal ini memakai Pendekatan Regulasi Perundang-Undangan (Regulation Approach) disertai Pendekatan konseptual (conceptual approach) lebih menekankan pada menelaah pendapat dari para ahli serta doktrin yang memberikan pendapatnya yang sesuai dengan perkembangan bidang hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung mengarah kepada penjara sebagai solusi utama dalam penanganan tindak pidana, termasuk pencurian ringan. Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dengan fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan keterlibatan langsung pelaku dalam proses penyelesaian dengan menggunakan prinsip keadilan dengan baik. Keadilan restoratif menekankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai bentuk penyelesaian konflik, dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak terkait. Meskipun masih ada tantangan dan keterbatasan, langkah-langkah ini mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif dalam menangani kasus-kasus pidana.

Kata Kunci: Restorative justice, Pencurian, KUHP, Implementasi

ABSTRACT

This study aims to examine the process and legal basis for the implementation of restorative justice in Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach to build legal arguments through the main issues, based on statutory regulations in Indonesia. Then this journal uses the Regulatory Approach accompanied by a conceptual approach that emphasizes more on examining the opinions of experts and doctrines that provide opinions that are in accordance with developments in the legal field. The results of the study show that the criminal justice system in Indonesia still tends to lead to prison as the main solution in handling criminal acts, including minor theft. The restorative justice approach offers a more humane alternative by focusing on restoring the losses experienced by the victim and the direct involvement of the perpetrator in the settlement process by using the principle of justice properly. Restorative justice emphasizes the restoration of victims, perpetrators, and the community as a form of conflict resolution, by involving the active participation of all parties involved. Although there are still challenges and limitations, these steps reflect efforts to achieve more holistic and inclusive justice in handling criminal cases.

Key Words: Restorative Justice, Theft, KUHP, Implementation

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Keadilan restoratif merupakan suatu paradigma baru pada sistem peradilan pidana yang memiliki fokus memulihkan kerugian, rekonsiliasi, dan restorasi terhadap imbas dari tindak pidana.¹ Pendekatan ini menawarkan alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang bermuara pada pembalasan. Pendekatan ini melibatkan komunikasi langsung korban dan pelaku demi mencari solusi bersama. Konsep keadilan restoratif, yang telah lama ada dalam sejarah peradilan manusia, kini telah mengalami revitalisasi dan diterapkan secara luas dalam sistem peradilan pidana di banyak negara maju. Di banyak negara maju, konsep ini sudah diimplementasikan secara nyata dalam seluruh tahap proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan hingga eksekusi. Bahkan, menurut ahli, keadilan restoratif sebenarnya telah menjadi model dominan dalam sejarah peradilan manusia sebelum istilah ini populer.

Sistem keadilan restoratif sebenarnya telah lama eksis di Indonesia. Kita bisa melihatnya dalam kebiasaan musyawarah mufakat yang sudah menjadi bagian dari adat istiadat kita. Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai filosofis negara, terlebih pada sila keempat yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” yang menekankan akan pentingnya musyawarah. Fungsi pokok keadilan restoratif ialah guna menyelesaikan masalah di masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Inti dari keadilan restoratif adalah mengembalikan hubungan yang rusak antara manusia dengan memberikan kesempatan untuk saling memaafkan.² Konsep ini sebenarnya merupakan upaya untuk kembali ke sistem peradilan yang lebih manusiawi, sebelum terlalu banyak campur tangan dari negara dan kelompok-kelompok tertentu.³

Menurut John Wals, rasa keadilan kita terbentuk sejak dini, terutama dalam lingkungan keluarga. Keluarga memiliki posisi penting untuk memupuk nilai-nilai moral serta empati pada anak agar tercapai nilai keadilan bermasyarakat.⁴ Jadi dalam hierarki nilai, kebenaran dan keadilan harus berada di posisi teratas, sedangkan otoritas harus tunduk pada keduanya. Menurut John Wals, keadilan adalah landasan utama bagi semua institusi sosial dan sistem pemikiran. Keadilan sosial di sini menyatakan persoalan tentang efisiensi dan koordinasi serta stabilisasi seperti halnya dalam perkara tindak pidana pencurian, Di mana korban sudah memaafkan pelaku atas tindak kejahatannya, dengan melakukan upaya perdamaian antar pihak pelaku maupun korban melalui restorative justice demi terciptanya keseimbangan dan kelayakan dalam kehidupan sosial. Keadilan restoratif

¹ Lazuardy, Gerry. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol 8 No.9, (2020), h. 1301-1312.

² Flora, Henny Saida. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No. 2, (2017), h. 41-60

³ Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2, (2019): 134-143.

⁴ Amarini, John Rawls dalam Indriati. “Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Administrasi,” *Media Hukum* 25, no. 2 (2018), h. 162-170.

menawarkan alternatif yang lebih humanis dalam menyelesaikan konflik. Keberhasilannya sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan dukungan dari aparat penegak hukum. Alih-alih memfokuskan pada hukuman, keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak melalui dialog dan keaktifan semua unsur yang terlibat. Prinsip "*just peace*" yang mendasari keadilan restoratif menekankan pentingnya pertemuan, diskusi, dan partisipasi aktif dalam mencari solusi. Sehingga keadilan restoratif tidak hanya memberikan rasa adil bagi korban, tetapi dapat memberi peluang untuk pelaku agar dapat berbenah diri.⁵ Keadilan restoratif menawarkan fleksibilitas dalam menangani kasus pencurian seperti kasus pencurian motor dengan kerugian ringan dan tidak menggunakan kekerasan fisik sehingga hanya menimbulkan kerugian berupa materi. Dari kasus tersebut dapat ditemukan bahwa tidak perlu terpaku pada aturan umum yang sama untuk semua pelaku pencurian. Konsep ini memungkinkan adanya penyesuaian sanksi sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana dan dampaknya terhadap korban. Keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dengan melibatkan aktif semua pihak yang berkonflik dalam mencari solusi yang saling menguntungkan. Beberapa aparat penegak hukum di Indonesia telah berhasil menerapkan praktik keadilan restoratif dalam berbagai kasus, sehingga membuktikan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan yang lebih restorative. Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang beradilan dan humanis, perlu dilakukan reformasi komprehensif terhadap hukum pidana dan hukum acara. Salah satu langkah penting adalah melalui penyesuaian prinsip-prinsip Keadilan Restoratif ke dalam hukum positif.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penerapan keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian oleh Siti Rokhiyah pada tahun 2021 yang berjudul "Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan oleh Kepolisian" menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif mulai diadopsi oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan, terutama dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepentingan korban serta pelaku. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Joko Priyono pada tahun 2020 dalam penelitiannya yang berjudul "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" menekankan pentingnya pendekatan ini dalam sistem peradilan anak untuk menghindari dampak negatif dari pemenjaraan, dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak dalam proses penyelesaian perkara.

Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi keadilan restoratif di Indonesia, namun belum secara spesifik mengulas penerapannya dalam perkara **tindak pidana pencurian**, terutama dalam hal pencurian yang tidak disertai kekerasan dan menimbulkan kerugian ringan. Penelitian ini secara khusus akan mengkaji penyelesaian tindak pidana pencurian dalam perspektif keadilan restoratif, dengan menelaah aspek praktis dan normatif dari proses perdamaian antara korban dan pelaku. Fokus penelitian ini bukan hanya pada implementasi formal oleh aparat penegak hukum, tetapi juga pada

⁵ Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018), h. 97-114.

efektivitas dialog, pemulihan hubungan sosial, dan potensi reduksi disparitas hukum yang selama ini terjadi dalam perkara pencurian kecil. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam merumuskan model penyelesaian perkara pencurian yang lebih adil, humanis, dan kontekstual, serta mendorong integrasi prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem hukum pidana nasional.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Implementasi restorative justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pencurian melalui mekanisme Restorative justice di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini dilakukan dengan tujuan secara umum untuk memberikan sumbangsih perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum acara pidana berkenaan dengan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Restorative Justice. Selain daripada itu, penulis juga berupaya secara khusus dalam penelitian ini untuk:

- 1) Mengetahui mengenai penerapan restorative justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia.
- 2) Mengetahui Proses penyelesaian perkara dengan metode restorative justice berdasarkan hukum positif di Indonesia

II. Metode Penelitian

Jurnal ini ditulis dengan memakai metode penelitian hukum normatif guna membangun argumentasi hukum melalui pokok permasalahan, berdasarkan peraturan-perundang-undangan di Indonesia. Dimana penulis ingin memberikan pemahaman berbasis ilmu hukum demi menemukan harmonisasi penelitian dalam menemukan kebenaran hukum yang komprehensif yakni dengan meneliti aturan-aturan perundangan yang meregulasi dengan kenyataan Indonesia. Kemudian jurnal ini memakai Pendekatan Regulasi Perundang-Undangan (*Regulation Approach*) disertai Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) lebih menekankan pada menelaah pendapat dari para ahli serta doktrin yang memberikan pendapatnya yang sesuai dengan perkembangan bidang hukum, guna menggali gagasan-gagasan yang menciptakan definisi tentang hukum, teori hukum, dan dasar hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dijumpai.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan penerapan restorative justice dalam perspektif perundang-undangan di Indonesia

Hukum hadir dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan tatanan yang adil dan tentram. Salah satu contoh nyata dari perwujudan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, terdapat aturan-aturan yang eksplisit dan implisit mengatur tindak pidana pencurian. Aturan-aturan ini bertujuan untuk memberikan Keamanan hukum bagi masyarakat dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku pencurian, sehingga tercipta rasa aman dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tindakan mengambil barang kepunyaan dari orang lain dengan melawan hukum

secara spesifik dijabarkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Selama ini, sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi pada pelaku. Akan tetapi, konsep keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih holistik dengan melibatkan aktif semua pihak yang berkonflik dalam mencari solusi. Dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada kepentingan korban dan memberikan peluang kepada pelaku guna dapat berbenah diri, keadilan restoratif diharapkan mampu mendapatkan hasil yang lebih baik di masa depan. Indonesia, dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif, telah menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Konsep keadilan restoratif bukanlah aspek baru di Indonesia. Jauh sebelum istilah ini populer, prinsip-prinsip dasarnya telah tertanam dalam nilai-nilai pekerti bangsa yang ada pada landasan filosofis negara. Prinsip musyawarah untuk mufakat dan penyelesaian konflik secara damai yang terkandung dalam Pancasila sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Selain itu, berbagai sistem hukum adat yang masih hidup hingga kini juga menawarkan mekanisme solusi terhadap sengketa yang berfokus pada pemulihan hubungan dan restorative justice.⁶

Keadilan restoratif menawarkan fleksibilitas dalam merespons keragaman kasus pidana. Prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat disesuaikan dengan konteks budaya dan hukum yang berbeda-beda. Meskipun penerapan keadilan restoratif membutuhkan dukungan dari sistem hukum yang berlaku, namun prinsip-prinsip dasarnya dapat menjadi inspirasi dalam mendesain sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak adanya adopsi formal terhadap keadilan restoratif dalam sistem hukum suatu negara tidak membatasi implementasi prinsip-prinsipnya sebagai upaya guna mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi masyarakat.⁷ Mengutip istilah '*communis opinio doctorum*', Bagir Manan menyebutkan praktik penegakan hukum di Indonesia telah menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam hukum positif Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem kita telah gagal mencapai tujuannya⁸ yang dimana pendekatan dari system ini lebih memakai metode sosiokultural dan bukan normative. Meskipun John Braithwaite lebih menekankan pada penerapan keadilan restoratif dalam konteks pidana, namun prinsip-prinsipnya dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks sosial, termasuk lingkungan sekolah dan tempat kerja.⁹ Konsep keadilan restoratif menekankan pada keterlibatan aktif korban dan pelaku dalam proses penyelesaian perkara dan dengan tujuan dapat memulihkan

⁶ Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban." *Gema* 27.49 (2015), h. 1497-1508.

⁷ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018), h. 173-190.

⁸ Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. (Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), 4.

⁹ Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. (England, Oxford University Press, 2002), 3.

hubungan yang telah rusak diakibatkan pelaku. Pelaku akan didorong untuk bertanggung jawab atas tindakannya melalui berbagai bentuk restitusi, seperti permintaan maaf atau pelayanan masyarakat, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak dari tindak pidana tersebut. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk memberdayakan semua pihak yang terlibat dalam memperbaiki dampak negatif dari tindak pidana.¹⁰

Pada praktik sistem peradilan Indonesia, susunan konsep tujuan pemidanaan yang bermula dengan *retribution*, yaitu pembalasan absolut kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan dampak atau manfaatnya. Selanjutnya, terdapat mekanisme *restraint* yang bertujuan mengucilkan pelaku dari masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat dari potensi kejahatan. Konsep *deterrence* juga diperkenalkan, yang mencakup *individual deterrence* yaitu hukuman yang membuat pelaku merasa jera dan *general deterrence*, yang bertujuan menjadikan pelaku sebagai contoh agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa. Selain itu, terdapat konsep *reformation* atau *rehabilitation*, yang berfokus dengan tujuan untuk memperbaiki pelaku agar dipercaya dapat kembali Masyarakat lagi.

Banyak pakar hukum pidana, psikolog, dan ahli perilaku anak menganggap metode keadilan restorative sebagai pendekatan yang tepat dengan mempertimbangkan pelaku, korban, keluarga, dan stakeholder lainnya untuk menangani masalah anak yang bersinggungan dengan hukum. Konsep ini akan membangun pemahaman mengenai kejahatan yang menyebabkan kerugian harus dipulihkan, termasuk kerugian yang dialami oleh korban maupun yang ditanggung oleh masyarakat.¹¹ Di samping itu, para pembuat kebijakan, baik legislative maupun eksekutif masih melihat pendekatan keadilan restoratif sebagai sekadar alternatif dalam penyelesaian kasus pidana, yang dianggap berbeda dari hukum yang berlaku di negara ini.¹²

Keadilan restoratif telah mendapatkan pengakuan hukum yang kuat di Indonesia, dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapannya, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk mengadopsi konsep keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan yang dimuat dalam UU Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim agar mencari nilai-nilai budaya lokal dalam memutus perkara. Dengan demikian, Mahkamah Agung dapat menjadi pelopor dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Implementasi keadilan restoratif dalam proses peradilan merupakan suatu keharusan. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Filosofis, adat, serta agama yang menjadi dasar nilai-nilai hukum di Indonesia. Lebih jauh lagi, penerapan keadilan restoratif tidak terbatas pada tingkat Mahkamah Agung.

Criminal justice system atau Sistem peradilan pidana merupakan mekanisme yang terintegrasi, dirancang guna mencapai tujuan keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara pidana. Istilah "sistem peradilan pidana" dan "sistem penegakan hukum" sering digunakan secara bergantian, karena keduanya merujuk pada proses transformasi norma hukum abstrak menjadi tindakan nyata dalam

¹⁰ Rosidah, Nikmah. "Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia" Pustaka Magister; Semarang, (2014), h. 103.

¹¹ Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari, Loc.cit.

¹² *Ibid*

Masyarakat.¹³ Setiap komponen dalam sistem ini memiliki peran yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka seluruh sistem akan terganggu dan tujuan untuk mencapai keadilan tidak akan tercapai. Muladi menggambarkan sistem peradilan pidana sebagai sebuah jaringan yang saling terkait, terdiri dari berbagai unsur hukum. Penting untuk diingat bahwa jaringan ini beroperasi dalam konteks sosial yang dinamis.¹⁴ Formalisme hukum yang berlebihan, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan hukum.¹⁵ KUHAP merupakan landasan hukum utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur seluruh aspek proses peradilan pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta memberikan kewenangan kepada lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.

Penerapan keadilan restorative dalam peraturan Perundang Undangan tertuang dalam:

1. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012** menjelaskan keadilan restorative yakni upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan semua pihak terkait. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai perdamaian dan pemulihan, bukan semata-mata hukuman. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, undang-undang ini mewajibkan penggunaan diversifikasi sebagai upaya pertama dalam penyelesaian perkara. Diversifikasi ini bertujuan untuk menghindari proses peradilan pidana formal dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui proses restorative.

Diversifikasi dalam penanganan perkara anak memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menghindari proses peradilan pidana konvensional, melindungi anak dari hukuman penjara, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian. Agar diversifikasi dapat dilakukan, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti ancaman pidana penjara yang tidak terlalu berat dan pelaku tidak merupakan pelaku residivis. Diversifikasi sendiri diimplementasikan dengan metode musyawarah yang harus menyertakan berbagai pihak, termasuk anak, orang tua, korban, dan para ahli, dengan selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

2. **Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum** merupakan langkah penting dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Surat keputusan tersebut memberikan panduan praktis bagi pengadilan untuk lebih optimal melaksanakan keadilan restoratif yang selama ini kurang mendapat perhatian. Dokumen ini memberikan panduan praktis bagi para hakim untuk menerapkan keadilan restoratif, dengan tujuan utama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Surat keputusan ini juga merinci karakteristik tindak pidana yang dapat digunakan dengan metode ini, seperti perbuatan pidana ringan tertentu, kasus yang melibatkan perempuan, anak-anak, dan kasus narkoba.

¹³ Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat, West Publishing CO, Edisi Delapan, 2004), 901.

¹⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), 2.

¹⁵ *Ibid*

Oleh karena itu, diharapkan mampu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif bagi semua stakeholder.

3. **Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020** memberikan landasan hukum terhadap implementasi keadilan restoratif. Peraturan tersebut mengatur bahwa jaksa dapat menghentikan penuntutan suatu perkara jika terdapat penyelesaian di luar pengadilan atau *afdoening buiten proces*. Syarat utamanya adalah bersangkutan memiliki ancaman pidana denda yang relatif ringan dan pelaku telah melakukan upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, peraturan ini memberikan fleksibilitas bagi penegak hukum dalam mencari solusi yang lebih adil dan efektif dalam menyelesaikan perkara pidana, terutama untuk kasus-kasus yang bersifat ringan.
4. **Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021** merupakan upaya Polri untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana. Konsep ini menggeser fokus dari pemidanaan semata menjadi upaya pemulihan keadaan semula dan keseimbangan antara para pihak. Dengan kata lain, Polri kini lebih mengedepankan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan dialog antara berbagai pihak yang terlibat. Peraturan ini memungkinkan penyelesaian perkara secara lebih manusiawi dan efektif, terutama untuk kasus-kasus tindak pidana ringan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai keadilan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.¹⁶
5. **PERMA No. 2 Tahun 2012** merupakan salah satu Upaya pengadilan dalam menerapkan restorative justice dalam ranah tindak pidana ringan (*tipiring*), yang dimana peraturan ini akan menjadi acuan tindak pidana ringan yang dapat menggunakan metode pendekatan restorative justice. Aturan ini diterapkan pada pelaku yang kooperatif mengakui dan mau bertanggung jawabkan perbuatannya serta hanya diterapkan pada perkara yang tidak menimbulkan dampak social yang signifikan.
6. **PERMA No. 4 Tahun 2014** merupakan aturan yang lebih memperjelas bagaimana penerapan restorative justice terutama pada kasus yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban dengan melibatkan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional dan pihak-pihak yang terlibat lainnya dengan hakim sebagai fasilitator diversifikasi. Peraturan mengarahkan hakim untuk mengupayakan diversifikasi anak yang didakwa dengan ancaman penjara dibawah tujuh tahun.

Dalam penerapannya, restorative justice telah memiliki pengaturan internal masing-masing sesuai dengan tujuan yang sama yaitu memulihkan kerugian bagi korban dan pelaku dalam bertanggung jawabkan perbuatannya tanpa melalui hukuman formal. Namun pembatasannya penerapannya menggunakan peraturan internal yang berbeda bergantung pada lembaga penegak hukum tempat diterapkan *restorative justice* seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sehingga dapat dilihat bahwa, belum ditemukannya peraturan setingkat undang-undang yang mengatur secara keseluruhan mengenai metode restorative justice di Indonesia.

¹⁶ Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12.01 (2022), h. 93 – 95.

3.2 Proses penyelesaian sengketa pencurian melalui mekanisme *Restorative Justice* di Indonesia

Saat ini, sistem peradilan pidana di Indonesia cenderung memilih penjara sebagai solusi utama untuk berbagai tindak pidana, termasuk pencurian ringan. Padahal, banyak kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui pendekatan restoratif, di mana fokusnya adalah pada pemulihan kerugian yang diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan membangun kembali hubungan dengan masyarakat.¹⁷

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) awalnya mendefinisikan tindak pidana ringan sebagai kejahatan yang ancaman hukumannya sangat rendah. Pencurian pun termasuk di dalamnya, dengan batas kerugian maksimal yang sangat kecil, yakni hanya Rp7.500. Namun, karena nilai uang mengalami inflasi dan kondisi sosial ekonomi berubah, Mahkamah Agung merasa perlu melakukan penyesuaian. Melalui peraturan ini, kerugian untuk tindak pidana ringan seperti pencurian dinaikkan menjadi Rp7.500.000. Selain itu, peraturan ini juga mengubah nilai denda maksimal untuk beberapa pasal terkait pencurian dalam KUHP, seperti Pasal 364, 373, dan 379, dengan mengalikan nilai lama sebesar 1000 kali lipat. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan kondisi saat ini dan memberikan penegakan hukum yang lebih adil dan efektif.¹⁸

Namun tidak setiap perkara dapat diselesaikan dengan metode *restorative justice*, penerapan metode *restorative justice* hanya dapat dilakukan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masing-masing instansi akan memiliki proses penerapan yang berbeda mengacu pada aturan pada yang terdapat pada instansi yang menangani perkara tersebut serta tidak semua tindak pidana pencurian bisa menggunakan metode *restorative justice* karena terdapat batasan dalam penerapan metode *restorative justice*.

Tahapan Proses pada Kepolisian	Batasan
1. Penyidikan, penyidik memiliki peran untuk mengevaluasi apakah suatu perkara memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> . Langkah-langkah yang diambil termasuk mengidentifikasi kasus yang dapat diselesaikan secara damai, memeriksa kerugian yang bisa dipulihkan, serta melakukan wawancara	Batasan dalam penerapan RJ menurut Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 mencakup jenis tindak pidana, pelaku, dan korban yang memenuhi kriteria, serta proses yang harus dilakukan secara sukarela, adil, dan tanpa paksaan. RJ hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dan tidak boleh melibatkan tindak pidana berat, seperti kekerasan atau narkoba. ¹⁹ Penyelesaian perkara

¹⁷ I Komang Aditya Diputra, et al. "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice Yang Mengedepankan kemanfaatan Hukum" *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022), h. 191-195.

¹⁸ Iklimah D and Indiyani A, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (2021), h. 143-163.

¹⁹ Hutahaean, Armunanto, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Hukum to-ra*: 8 (2) (2022), h.140-145.

<p>dengan pelaku dan korban untuk mengetahui kesiapan mereka dalam menyelesaikan perkara. Jika pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab, penyidik melanjutkan dengan memulai proses mediasi antara pelaku dan korban, yang bisa melibatkan pihak ketiga, seperti tokoh masyarakat atau lembaga yang berkompeten, untuk mencapai kesepakatan damai.</p> <p>2. Mediasi berhasil dan tercapai kesepakatan damai, penyidik menyusun surat kesepakatan yang berisi langkah-langkah pemulihan yang akan diambil oleh pelaku, seperti permintaan maaf atau ganti rugi, yang harus disetujui kedua belah pihak tanpa tekanan. Hasil mediasi kemudian dilaporkan kepada atasan penyidik dan jika kesepakatan telah dipenuhi, penyidik mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3), yang menandakan bahwa perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan.</p> <p>3. Pelaku diwajibkan menjalani pemulihan, seperti memberikan ganti rugi atau mengikuti program rehabilitasi sosial untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa di masa depan.</p>	<p>dengan <i>restorative justice</i> mengedepankan pemulihan kerugian bagi korban dan rehabilitasi bagi pelaku, namun tetap memperhatikan keadilan bagi kedua belah pihak.</p>
--	--

Tahapan Proses pada Kejaksaan	Batasan
<p>1. Penyidikan, Kejaksaan berperan dalam membantu penyelesaian perkara melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i>. Proses dimulai setelah penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian</p>	<p>Penerapan RJ dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 memiliki batasan pada jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan, di mana hanya tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman di bawah 5 tahun yang</p>

<p>jaksa akan menilai apakah kasus memenuhi kriteria RJ dan melakukan evaluasi terhadap peran pelaku, korban, serta dampak tindak pidana. Jaksa juga menginisiasi proses mediasi antara pelaku dan korban, yang bisa melibatkan mediator dari pihak Kejaksaan atau pihak ketiga yang netral, seperti tokoh masyarakat atau LSM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penuntutan, Jaksa mengevaluasi hasil mediasi dan memastikan kesepakatan yang tercapai bersifat sukarela, adil, serta tidak melanggar ketentuan hukum. Jika pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai, dibuat perjanjian yang mencakup permintaan maaf, kompensasi, atau pemulihan lainnya. 3. Jaksa kemudian menyusun laporan penyelesaian dan mengeluarkan Surat Penghentian Penuntutan (SP3) jika tidak ada alasan hukum untuk melanjutkan ke pengadilan. 4. Pelaku yang telah menyelesaikan perkara melalui RJ diwajibkan untuk menjalani langkah pemulihan seperti ganti rugi atau rehabilitasi sosial, sementara korban juga berhak atas kompensasi atau tindakan pemulihan sesuai kesepakatan yang dicapai. 	<p>memenuhi kriteria. Pelaku dan korban harus setuju tanpa paksaan untuk melakukan mediasi yang menghasilkan kesepakatan yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.²⁰ Penerapan RJ juga harus melalui evaluasi jaksa untuk memastikan kesepakatan tidak melanggar hukum dan dapat menghindari dampak negatif bagi masyarakat. Proses ini dapat berujung pada penghentian penuntutan dengan diterbitkannya Surat Penghentian Penuntutan (SP3), dengan syarat kesepakatan yang dicapai bersifat sukarela dan tidak merugikan pihak manapun.</p>
---	--

²⁰ Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA*, e-ISSN: 2657-0343 (2021), h. 233-247.

Tahapan Proses pada Pengadilan	Batasan
<p>1. Penyidikan, Pada tahap ini <i>restorative justice</i> diterapkan melalui mekanisme <i>diversion</i> (pengalihan kasus tertentu) dengan kriteria pelaku adalah anak atau orang yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal di bawah 5 tahun. Kasus yang sifatnya tidak terlalu berat, di mana penyelesaian melalui <i>restorative justice</i> dianggap lebih efektif.</p> <p>2. Penuntutan, <i>restorative justice</i> dapat diterapkan jika korban dan pelaku telah mencapai kesepakatan damai. Jaksa penuntut umum (JPU) melakukan pendekatan dan mediasi untuk menemukan solusi yang diterima kedua belah pihak, seperti ganti rugi atau permintaan maaf. Jika kesepakatan tercapai, jaksa dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan.</p> <p>3. Persidangan, <i>restorative justice</i> dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Hakim dapat mempertimbangkan kesepakatan damai untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman pidana, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan pemulihan kerugian atau tindakan rehabilitasi.</p>	<p>Batasan penerapan Restorative Justice dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 dan PERMA No. 4 Tahun 2014 meliputi jenis tindak pidana (hanya yang ringan atau tidak melibatkan kekerasan), pelaku (terutama pelaku yang tidak memiliki riwayat kriminal berat atau anak), kesepakatan damai antara korban dan pelaku, serta kondisi bahwa tidak ada unsur kekerasan yang berat.²¹</p>

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, korban kejahatan seringkali hanya dianggap sebagai objek pasif dalam proses hukum. Mereka lebih sering

²¹ Deni setya Bagus Yuherawan and Ribut Baidi Sulaiman. " Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 2: No. 1, Article 3 (2023), h.1-18.

dilihat sebagai penyedia bukti untuk menuntut pelaku, daripada sebagai subjek yang mengalami kerugian dan penderitaan. Meskipun Jaksa Penuntut Umum secara formal mewakili kepentingan korban, dalam praktiknya, fokus utama jaksa adalah pada penuntutan pelaku. Hal ini menyebabkan korban merasa tidak memiliki kontrol atas proses hukum yang sedang berjalan dan kesulitan untuk mendapatkan keadilan yang mereka harapkan.²²

Pada sistem peradilan pidana konvensional, terutama dalam kasus pencurian, proses hukum akan terus berlanjut meskipun pelaku dan korban telah mencapai kesepakatan damai. Hal ini menunjukkan bahwa perdamaian yang terjadi di luar persidangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusan pengadilan. Proses hukum yang panjang dan birokratis ini seringkali tidak menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan justru dapat memperkeruh hubungan antara korban dan pelaku. Konsep keadilan restoratif hadir sebagai solusi yang menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif. Dalam keadilan restoratif, pelaku dan korban secara aktif dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara pidana, sehingga memungkinkan terjadinya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang lebih baik. Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia yang menempatkan dialog dan musyawarah sebagai cara utama dalam menyelesaikan konflik.²³ Sistem hukum Indonesia yang merupakan perpaduan dari berbagai sistem hukum, seperti adat dan Islam, juga sangat menjunjung tinggi nilai dialog dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, keadilan restoratif yang menekankan pada partisipasi aktif korban dan pelaku dalam mencari solusi, dapat dianggap sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia.²⁴

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Meskipun kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Indonesia telah memiliki aturan internal masing-masing terkait penerapan Restorative Justice (RJ) melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, Surat Edaran Jaksa Agung No. 11 Tahun 2020, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana secara damai, namun sampai saat ini belum ditemukan terdapatnya peraturan yang setingkat perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif penerapan RJ di seluruh tahapan proses hukum. Hal ini menyebabkan adanya ketidakselarasan dalam penerapan RJ antara lembaga penegak hukum tersebut, karena masing-masing memiliki pedoman dan batasan yang berbeda. Untuk menciptakan keseragaman dan efektivitas dalam penerapan RJ, diperlukan sebuah peraturan setingkat undang-undang yang akan mengatur secara jelas dan terpadu mengenai prosedur, jenis tindak pidana, dan peran setiap

²² Josefhin M and J H R Rasuna Said, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018), h. 104

²³ Maulidar, Mira, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022), h. 143-155

²⁴ Chandra, Septa, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015), h. 255-277

lembaga penegak hukum, guna memastikan penerapan RJ yang lebih adil dan konsisten di seluruh sistem peradilan pidana. Adapun penerapan Restorative Justice (RJ) berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung No. 11 Tahun 2020, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, dan Perpol No. 8 Tahun 2021 memiliki beberapa kesamaan, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan fokus pada pemulihan bagi korban dan pelaku, namun juga terdapat perbedaan signifikan terkait kewenangan dan prosesnya. Perpol No. 8 Tahun 2021 memberikan peran yang lebih besar kepada kepolisian dalam penyelesaian perkara pada tahap penyidikan, sedangkan Surat Edaran Jaksa Agung No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 menekankan peran jaksa dalam memfasilitasi, mengawasi, dan menilai kesepakatan yang tercapai antara korban dan pelaku. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan RJ, dengan Perpol No. 8 Tahun 2021 yang lebih ketat dalam membatasi jenis perkara yang bisa menggunakan RJ, sementara kedua peraturan kejaksaan lebih fleksibel dalam penanganan kasus ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rudi Rizky (ed). *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*. (Jakarta, Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), 4.
- Braithwaite, John. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. (England, Oxford University Press, 2002), 3.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1996), 2.
- Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, (Amerika Serikat, West Publishing CO, Edisi Delapan, 2004), 901.

Jurnal:

- Arief Hanafi and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2 (2018), h. 173-190.
- Amarini, John Rawls dalam Indriati. "Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Administrasi," *Media Hukum* 25, no. 2 (2018), h. 162-170.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2, (2019): 134-143.
- Chandra, Septa, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015), h. 255-277.
- Deni setya Bagus Yuherawan and Ribut Baidi Sulaiman. " Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Indonesia Criminal Law Review: Vol. 2: No. 1, Article 3* (2023), h.1-18.
- Hutahaean, Armunanto, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum", *Jurnal Hukum to-ra: 8* (2) (2022) ,h.140-145.
- Iklimah Dinda and Indiyani Adiasta, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan," *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (2021), h. 143-163.
- I Komang Aditya Diputra, et al. "Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan

- Restorative Justice Yang Mengedepankan kemanfaatan Hukum” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022), h. 191-195.
- Josephin Mareta and Jalan H R Rasuna Said Kav, “Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2018), h. 104
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan hukum melalui restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban." *Gema* 27.49 (2015), h. 1497-1508.
- Lazuardy, Gerry. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pelaku Penyebaran Hoaks.” *Jurnal Kertha Semaya Vol 8 No.9*, (2020), h. 1301-1312.
- Maulidar, Mira. “Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam,” *At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13 (2022), h. 143-155.
- Rosidah, Nikmah. “Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia” *Pustaka Magister; Semarang*, (2014), h. 103.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12.01 (2022), h. 93 – 95.
- Syahrin, M. Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu,” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018), h. 97-114.
- Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Lex LATA*, e-ISSN: 2657-0343 (2021), h. 233-247.
- Flora, Henny Saida. “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Law Pro Justitia*, Volume II, No. 2, (2017), h. 41-60.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
- Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)
- PERMA No. 4 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052)
- Perpol No. 8 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947)
- Surat Edaran Jaksa Agung No. 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 705)
- Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)